

GAMBARAN SINGKAT TENTANG KETERKAITAN EKONOMI MAKRO
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
DI TIGA PROVINSI KALIMANTAN

Oleh: Dr. Maria Ratnaningsih, SE, MA

September 2011

1. Pendahuluan

Pulau Kalimantan terkenal sebagai pulau dengan kekayaan alam yang melimpah yaitu berupa kawasan hutan yang luas, memiliki kandungan tambang minyak, gas dan batubara, serta mineral lainnya. Kekayaan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah untuk mendanai pembangunan yaitu dengan cara mengambil atau mengekstraksi sumber daya alam baik sebagai bahan input maupun sebagai komoditi ekspor. Hasil pengambilan sumber daya alam ini dicatat sebagai pendapatan dan dihitung berdasarkan nilai tambahnya dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada awal pemanfaatan sumber daya alam tersebut, yaitu di saat jumlah yang tersedia masih melimpah, pengambilan ini belum dirasakan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seluruhnya masih dicatat sebagai nilai positif dari pembangunan. Namun seperti kita ketahui bahwa alam memiliki keterbatasan. Pengambilan atau pengurasan sumber daya alam yang secara terus menerus dilakukan, di mana tingkat pengambilannya lebih cepat daripada tingkat pertumbuhannya, telah menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Hal ini semakin tampak di mana saat ini kayu hutan sebagai bahan input semakin sulit dijumpai. Pola pemanfaatan sumber daya alam seperti ini juga menyebabkan tidak tercapainya pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan.

Pulau Kalimantan dengan luas keseluruhan mencapai 743.330 km² dibagi dalam empat wilayah administrasi yaitu Provinsi Kalimantan Barat (146.807 km²), Provinsi Kalimantan Tengah (157.983 km²), Provinsi Kalimantan Timur (245.237 km²), dan Provinsi Kalimantan Selatan (193.303 km²).

2. Penduduk, kemiskinan, dan ketenagakerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2010, Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yaitu mencapai sekitar 4,3 juta yang terdiri dari 968 rumah tangga. Namun apabila dilihat dari pertambahan jumlahnya, maka Provinsi Kalimantan Timur mengalami penambahan jumlah penduduk tertinggi yaitu bertambah 45% pada tahun 2010 bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2000 yaitu dari 2,4 juta jiwa menjadi 3,5 juta jiwa. Penambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi ini tentu perlu pengaturan yang sangat serius karena penambahan jumlah penduduk berarti juga penambahan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal maupun tempat berusaha.

Tabel 1: Jumlah Penduduk di Tiga Provinsi dan Indonesia

Tahun	Kalbar	Kalteng	Kaltim	Indonesia
1990	3,229,153	1,396,486	1,876,663	179,378,946
2000	4,034,198	1,857,000	2,455,120	206,264,595
2010	4,395,983	2,212,089	3,553,143	237,641,326

Sumber: Sensus Penduduk, 2010, BPS

Selain masalah kebutuhan ruang, penambahan jumlah penduduk juga memerlukan berbagai penanganan lainnya seperti ketersediaan pekerjaan, kecukupan pangan, penyediaan pendidikan dan kesehatan, dan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketidaksiapan pemerintah akan menimbulkan ketimpangan sosial di mana salah satunya ditunjukkan dengan adanya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin secara absolut terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Barat yaitu mencapai 584.300 jiwa, namun secara persentase jumlah tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Timur yaitu mencapai 16,98% (324.800 jiwa) dari jumlah penduduk keseluruhan. Posisi ini tidak berubah karena pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin terbanyak tetap ada di Provinsi Kalimantan Barat yaitu mencapai 428.800 jiwa sedangkan dari sisi persentase sebesar 13,6% (243.000 jiwa) ada di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah penduduk miskin tahun 2007 mencapai 210.300 jiwa dan pada tahun 2010 berkurang menjadi 164.200 jiwa.

Tabel 2: Jumlah Penduduk Miskin tahun 2007 dan 2010 di Tiga Provinsi di Kalimantan

	Kalbar		Kalteng		Kaltim	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Desa	440.2	345.3	159.1	131	188.7	163.8
Kota	144.1	83.4	51.2	33.2	136.1	79.2
Jumlah	584.3	428.8	210.3	164.2	324.8	243.0
%	12.91	9.02	9.38	6.77	16.98	13.66

Sumber: Data kemiskinan Tahun 2007 dan 2010, BPS

Hal lain yang menguatkan posisi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang kurang berhasil dalam masalah kemiskinan adalah tingkat garis kemiskinan penduduk tahun 2007 maupun 2010 lebih rendah daripada garis kemiskinan rata-rata nasional. Pada tahun 2007 tercatat sebesar Rp 142.529 sedangkan di tingkat nasional mencapai Rp 166.697, dan pada tahun 2010 mencapai Rp 180.407 sementara di tingkat nasional mencapai Rp 211.726. sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional, sementara untuk Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya untuk mengatasi masalah kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional dan tentunya menyisakan permasalahan tersendiri bagi provinsi yang bersangkutan

Keterkaitan antara kemiskinan dan ketidakefektifan pembangunan untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat juga dapat dilihat melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di masing-masing provinsi. Berdasarkan data tahun 1996, 2006, dan 2009 tampak bahwa IPM Provinsi Kalimantan Barat merupakan yang terendah dibanding dua provinsi lainnya dan angka IPM ini juga berada di bawah rata-rata IPM Nasional. Kalimantan Barat berada pada urutan ke 28, sedangkan Kalimantan Tengah berada pada urutan ke 7 dan Kalimantan Timur pada urutan ke 5.

Tabel 3: IPM di Tiga Provinsi dan Indonesia

	Kalbar		Kalteng		Kaltim		Indonesia
	Nilai	Ranking	Nilai	Ranking	Nilai	Ranking	Nilai
1996	63.60	23	71.30	5	71.40	4	67.70
2006	67.08	28	73.40	5	73.26	6	70.10
2009	68.79	28	74.36	7	75.11	5	71.76

Sumber: Data IPM, BPS, 2010

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah pendidikan. Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun 2010, tampak bahwa hampir semua provinsi berhasil dalam menjalankan program pemerintah untuk memberikan pendidikan dasar 6 tahun yaitu tingkat SD, dimana secara keseluruhan mencapai angka partisipasi sekolah hampir sama dengan tingkat nasional (98,02%) kecuali provinsi Kalimantan Barat yang masih sedikit di bawah angka nasional (97,04%). Untuk angka partisipasi sekolah tingkat SLTP rata-rata mencapai angka di atas 80% atau lebih rendah dari tingkat SD. Sedangkan untuk tingkat SLTA persentasenya semakin menurun di mana tingkat partisipasi sekolah baru mencapai sekitar 50%. Lebih lanjut, tingkat partisipasi sekolah untuk level pendidikan tinggi (diploma dan universitas) masih sangat rendah yaitu baru mencapai sedikit di atas angka 11% untuk Kalimantan Barat dan Tengah, sedangkan Kalimantan Timur mencapai sekitar 14%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat partisipasi sekolah ini, sumber daya manusia yang ada di tiga provinsi ini masih belum dapat digolongkan sebagai tenaga kerja atau SDM yang handal karena hanya sekitar 50%nya berpendidikan SLTA dan sekitar 11-14% berpendidikan tinggi, dan sisanya sekitar 36% berpendidikan SD

dan SLTP. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk mampu memberikan bekal pendidikan dan pengembangan SDM terampil yang siap pakai sebagai tenaga kerja handal.

Tabel 4: Angka di Tiga Provinsi

	Kalbar	Kalteng	Kaltim	Indonesia
SD	97.04	98.7	98.68	98.02
SMP	84.48	86.83	92.49	86.24
SMA	50.35	54.5	64.76	56.01
PT	11.43	11.06	14.88	13.77

SDM terampil yang tenaga kerja

Partisipasi Sekolah Tahun 2010

Sumber: Data Pendidikan, BPS, 2010

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1,6 juta penduduk di mana 10%nya merupakan pengangguran terbuka (*open employment*). Dari data yang ada tampak bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersier (industry jasa) merupakan yang terbanyak yaitu mencapai hampir 30% dan di sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan) mencapai sekitar 38%, sedangkan sekitar 12% sisanya bekerja di sektor sekunder (industry pengolahan). Hal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran jenis pekerjaan atau bidang pekerjaan yang diminati dari masyarakat yaitu beralih dari sektor primer ke sektor tersier, mengingat secara umum di Indonesia sektor primer masih mendominasi penyerapan atau penyediaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal. Hal ini masih terjadi di Kalimantan Barat di mana jumlah penduduk yang bekerja di sektor primer masih dominan yaitu sebesar 66% dari sekitar 2 juta penduduk yang bekerja, sektor sekunder sebanyak 4%, dan sektor tersier sebanyak 30%.

Tabel 5: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor di Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan	2008	2009	2010
Sektor Primer	40.32	42.4	38.62
Sektor Sekunder	13.51	12.1	12.0
Sektor Tersier	46.17	45.5	49.38
Jumlah Angkatan kerja	1,416,963	1,460,996	1,648,455
Pengangguran Terbuka	157,425	158,224	166,557

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2011, BPS

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Provinsi Kalimantan Timur

Kontribusi sektor pertambangan yang berasal dari minyak bumi dan gas alam sangat mendominasi dalam PDRB. PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2008 mencapai Rp 314,8 trilyun, kemudian sedikit menurun menjadi Rp 284,9 trilyun pada tahun 2009, namun pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi Rp 320,9 trilyun. Apabila nilai migas dikeluarkan, maka nilai PDRB akan berkurang sebesar 41,46% menjadi Rp 187,8 trilyun, dan apabila kontribusi migas dan batubara dikeluarkan juga maka nilai PDRB akan menjadi Rp 103,8 trilyun atau hanya sebesar 32,37% dari nilai PDRB yang ada. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena kecenderungan yang terjadi hingga saat ini adalah eksploitasi tambang masih sangat tinggi dan terus dilakukan hampir tidak terkendali. Kerusakan lingkungan bekas bahan tambang yang sulit atau hampir tidak dapat dikembalikan seperti bentang lahan semula, dan sifat sumber daya tambang sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus dipertimbangkan dengan benar.

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi dengan migas lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa migas maupun tanpa migas dan batubara seperti tampak pada table berikut. Hal ini memberikan implikasi bahwa sumbangan sektor di luar pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi mampu berkembang dengan lebih baik. Hal ini juga akibat pengaruh fluktuasi harga internasional untuk komoditi migas dan pertambangan yang lebih bersifat eksternal namun sangat mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Di samping itu, perhitungan ekonomi, baik dari sisi nilai total, pertumbuhan, maupun pendapatan perkapita yang memasukkan nilai migas akan memberikan arah yang keliru khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita yang mencapai angka Rp 39,2 juta per tahun pada tahun 2009, yang kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi Rp 34,2 juta per tahun atau rata-rata sekitar Rp 108.00 per hari yang jauh lebih tinggi dari batas kemiskinan menurut World Bank USD 2 per hari. Apabila penghitungan ini benar maka tidak ada penduduk Kalimantan Timur yang masuk dalam kategori miskin seperti telah diuraikan di atas.

Resiko lain yang harus diperhitungkan sejak dini adalah sektor penggalan dan pertambangan memberikan kontribusi yang sangat tinggi pada PDRB Provinsi Kalimantan Timur yaitu mencapai 45,43% pada tahun 2008, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 48,19%. Kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 34,26% untuk tahun 2008 dan menjadi 24,05% untuk tahun 2010. Dikatakan beresiko apabila kecenderungan pengambilan bahan tambang dan galian akan terus mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, khususnya jika industri pengolahan terkait dengan kegiatan hasil tambang dan penggalan. Apabila tidak diantisipasi dari awal, maka pada saat bahan tambang tidak lagi dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber utama ekonomi, maka akan terjadi *colaps* seperti yang pernah dialami oleh Provinsi lain seperti Provinsi Bangka dan Belitung. Kegiatan pertambangan dan penggalan belum sepenuhnya mampu menjadi leverage dan prime mover untuk sektor lainnya. Memang dari sisi pendapatan dan kontribusi pada PDB maupun peran pada kesejahteraan masyarakat (lihat IPM, Pendapatan per Kapita, dll) kegiatan di sektor pertambangan dan

penggalan serta industry pengolahannya mampu memberi dukungan yang lebih, namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pembangunan karena sisi sosial dan lingkungan belum dimasukkan dalam perhitungannya.

Tabel 6: Kontribusi Sektoral PDRB ADBH (dengan migas)
Provinsi Kalimantan Timur

KETERANGAN (%)	2008	2009	2010
Pertanian	4.97	5.25	5.6
Pertambangan & Penggalan	45.43	49.42	48.19
Industri Pengolahan	34.26	25.64	24.05
Listrik, gas, Air Bersih	0.23	0.36	0.27
Konstruksi	2.13	2.59	2.88
Perdagangan, Restoran, Hotel	5.74	7.56	8.46
Transportasi & Komunikasi	2.97	3.6	3.83
Keuangan & Jasa Perusahaan	1.79	2.17	2.41
Jasa-Jasa	2.09	3.48	4.29

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2010, BPS

Rusaknya sumber daya alam dan termasuk hilangnya fungsi lingkungan akibat kegiatan penambangan belum dihitung dan diinternalkan sebagai biaya pembangunan, sehingga hasil pencatatan kinerja ekonomi di atas belum dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya dari sebuah kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam yang terkait dengan valuasi ekonomi pertambangan dan dampaknya pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian akan diperoleh perhitungan ekonomi hijau (*green economy*) sebagai indikator yang sesungguhnya dari sebuah perekonomian daerah.

b. Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, tampak bahwa PDRB Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tidak setinggi Kalimantan Timur yang ditunjang oleh sektor pertambangan dan penggalan. PDRB Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada tahun 2005 yang dihitung atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar Rp 33,8 trilyun dan Rp 20,9 trilyun. Angka ini meningkat hampir 80% pada tahun 2010 di mana masing-masing menjadi Rp 60,4 trilyun dan Rp 40,56 trilyun.

Data PDRB Provinsi Kalimantan Barat untuk tiga tahun terakhir yaitu periode tahun 2007 – 2009, khususnya untuk kontribusi per sektor menunjukkan bahwa ada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, industry pengolahan, dan sektor perdagangan, restoran, dan hotel yaitu masing-masing sebesar 25,45%, 17,12%, dan 23,58% (data tahun 2009, di mana persentasenya tidak banyak mengalami perubahan selama tiga tahun tersebut). Hal ini tampak berbeda dari kontribusi PDRB sektoral di

Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan, restoran, dan hotel ada kegiatan ekonomi lain yang memicu pertumbuhan ekonomi dan diharapkan juga mampu menjadi pendorong sektor lainnya.

Tabel 7 : Kontribusi per sektor pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Barat

KETERANGAN (%)	2007	2008	2009
Pertanian	25.21	25.49	25.45
Pertambangan & Penggalian	1.34	1.38	1.43
Industri Pengolahan	18.35	17.73	17.12
Listrik, gas, Air Bersih	0.43	0.32	0.3
Bangunan	7.86	7.93	8.11
Perdagangan, Restoran, Hotel	23.55	23.55	23.58
Transportasi & Komunikasi	7.18	7.55	7.86
Keuangan & Jasa Perusahaan	4.89	4.84	4.81
Jasa-Jasa	0.11	0.11	0.11
Nilai PDRB ADHberlaku (Rp juta)	42,478,600	48,414,404	53,865,794

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010, BPS

Hal yang perlu dicermati dari data PDRB, terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis pemanfaatan lahan adalah kegiatan perkebunan yang masih sangat marak hingga saat ini, namun berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Barat ternyata sub sektor perkebunan hanya mampu memberikan kontribusi sekitar 9% terhadap sektor pertanian. Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga dapat dikaji biaya dan manfaat dari pembukaan lahan secara lebih mendalam lagi termasuk menginternalkan biaya eksternal dari pembukaan lahan perkebunan.

Alasan mengapa sektor perkebunan belum mampu memberikan kontribusi yang optimum juga dapat dilihat dari data perkembangan perijinan perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Juni, 2011). Dikatakan bahwa 41,54% dari luas wilayah Kalimantan Barat atau sekitar 6.097.913 Ha merupakan pertanian lahan kering. Dari luas tersebut dialokasikan untuk lahan perkebunan seluas 3.500.000 Ha dengan alokasi 1,5 juta Ha untuk perkebunan sawit. Dari total luas 3,5 juta ha, telah dikeluarkan ijin berupa informasi lahan, ijin lokasi, IUP dan HGU bahkan mencapai luas 3.582.238,68 Ha kepada 359 perusahaan serta penerbitan HGU seluas 576.611,90 Ha. Namun dari semua ijin yang sudah dikeluarkan tersebut realisasi penanaman baru mencapai 695.932,67 Ha yang dikelola oleh 211 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan perkebunan oleh pemerintah belum maksimum. Secara khusus untuk perkebunan kelapa sawit, tercatat bahwa realisasi penanaman baru mencapai ...% atau seluas 683.108,19 Ha dari 1,5 juta Ha yang dicadangkan. Dari luas tanam tersebut tidak semuanya mampu memberikan hasil yang maksimal karena masih terdiri dari 320.982 ha tanaman belum menghasilkan, 370.164 ha tanaman menghasilkan, dan

4.786 ha tanaman tua. Dengan demikian optimalisasi penggunaan lahan yang sudah dialokasikan untuk perkebunan masih harus terus diupayakan.

4. Nilai ekonomi hasil hutan non kayu

Seperti telah kita ketahui bahwa masyarakat asli Kalimantan hidup dari hutan. Mereka memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan sebagai tempat untuk hidup. Hingga saat ini, ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan tetap sangat tinggi. Namun disayangkan bahwa keberadaan mereka terdesak oleh pembangunan yang memanfaatkan hutan bagi kegiatan kehutanan maupun perkebunan dalam skala besar yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah termasuk pengelolaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat adat di Desa Ampa, Kabupaten Barito Timur diperoleh gambaran bahwa hasil hutan non kayu ternyata mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat setempat dibandingkan apabila masyarakat bekerja sebagai pegawai atau buruh pada perusahaan. Sebagai perbandingan, Upah Minimum Regional (UMR) per bulan pada tahun 2010 di Provinsi Kalimantan Barat adalah Rp 741.000, di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 986.590, dan di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 100.200. Sedangkan rata-rata upah/gaji karyawan/buruh per bulan pada tahun yang sama di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp 1.312.590, di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp 1.436.331, dan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka tertinggi yaitu Rp 2.183.167.

Tabel 8: Upah Minimum Regional

Provinsi	2008	2009	2010
Kalimantan Barat	645,000	705,000	741,000
Kalimantan Tengah	765,868	888,400	986,590
Kalimantan Timur	815,000	955,500	100,200

Sumber: Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia 2011, BPS

Di sektor non formal, yaitu pemanfaatan hasil hutan non kayu yang selama ini masih dilakukan oleh masyarakat lokal tampak bahwa ada empat komoditi utama yang dimanfaatkan yaitu damar, madu, karet, dan gaharu. Madu dapat dipanen dua kali dalam sebulan dalam jumlah rata-rata 30 liter per panen dengan harga jual rata-rata Rp 50.000/liter, kemudian dammar dapat dipanen rata-rata 200 kg/bulan dan dijual dengan harga rata-rata Rp 12.000/kg, dan karet rata-rata 15 kg/bulan dengan harga jual rata-rata Rp 14.000/kg. Gaharu juga masih dapat dipanen dan menghasilkan uang rata-rata Rp 15

juta/tahun. Dari keseluruhan hasil panen tersebut, maka dapat dihitung bahwa setiap orang (khususnya kepala keluarga) mampu memperoleh pendapatan rata-rata Rp 4.700.000,-/bulan. Desa Ampa di Kabupaten Barito Timur terdiri dari 40 KK, maka apabila setiap KK mampu memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.700.000, maka secara keseluruhan diperoleh pendapatan bagi seluruh penduduk di wilayah desa tersebut sebesar Rp 138.000.000,- per bulan. Asumsi ini berani dilakukan karena pola pencaharian masyarakat lokal masih terpolo sama yaitu sebagai peramu dan dilakukan secara komunal seluruh masyarakat desa.

Tabel 9 : Nilai Ekonomi Pemanfaatan Hutan Non Kayu
Di Desa Ampa, Kabupaten Barito Timur, 2011

Jenis	Keterangan	Harga (Rp)	Hasil/KK	Hasil 1 desa
Madu	2 kali panen @ 30 liter	50.000/liter	3,000,000	120,000,000
Damar	200 kg/bulan	12.000/kg	240,000	9,600,000
Karet	15 kg/bulan	14.000/kg	210,000	8,400,000
Gaharu	rata-rata Rp 15 jt/tahun		1,250,000	50,000,000
			4,700,000	138,000,000

Ket: tidak termasuk nilai kayu karena pada dasarnya penebangan kayu hanya untuk kebutuhan sendiri

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan hasil hutan non kayu memberikan tingkat penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari bekerja sebagai buruh maupun karyawan. Di samping itu, apabila pemanfaatan hasil hutan tetap dilakukan dengan pola kearifan lokal maka kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akan dapat dikendalikan karena pola pemanfaatan lahan akan disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Namun pola dan kearifan lokal ini yang hingga saat ini masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena target pembangunan dan ekonomi lebih bersifat skala besar dan jangka pendek. Perbedaan inilah sumber dari konflik yang akan terus berlangsung dan memberikan dampak negative pada pembangunan karena adanya egosentris dan lemahnya bidang pengawasan dan perencanaan pembangunan.

5. Kesimpulan

- a. Ada hal yang menarik untuk dikaitkan antara kinerja ekonomi dengan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun nilai PDRB Kalimantan Barat lebih tinggi daripada Kalimantan Tengah, namun hasil capaian indikator kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM, angka partisipasi sekolah, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan tampak lebih baik di Provinsi Kalimantan Tengah daripada di Kalimantan Barat.
- b. Pemberian ijin perkebunan di Kalimantan Barat belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga masih banyak lahan berijin yang belum dimanfaatkan dan sub sektor perkebunan hanya mampu memberikan kontribusi sekitar 9% atau sekitar Rp 1,21 trilyun terhadap sektor pertanian secara keseluruhan.

- c. Kegiatan pertambangan dan penggalian di Provinsi Kalimantan Timur mendominasi kegiatan ekonomi daerah, namun secara keseluruhan PDRB tampak bahwa kegiatan ini belum mampu memberikan dampak pada sektor lain untuk berkembang. Antisipasi untuk menggunakan hasil tambang dan galian untuk pengembangan sektor lain belum tampak. Hal ini sangat beresiko apabila terjadi kelangkaan sumber daya tambang dan galian akibat over eksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutannya.
- d. Valuasi ekonomi untuk semua jenis kegiatan terkait dengan pemanfaatan lahan belum dilakukan sehingga nilai-nilai yang dipublikasikan masih bersifat semu karena belum menginternalisasikan biaya eksternal (kerusakan lahan, nilai modal alam, dll).
- e. Berdasarkan perhitungan sederhana yang dilakukan di desa Ampa tampak bahwa sumber daya hutan masih merupakan sumber penghasilan utama masyarakat lokal yang berkelanjutan karena pemanfaatannya tidak bersifat merusak dan hasilnya benar-benar diterima oleh masyarakat lokal dengan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan UMR dan upah/gaji buruh/karyawan. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan kawasan hutan khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.